Cara Penggunaan Aplikasi ILDIS 3

SUARCH

Pencarian Popule

Perundang Unitarion

Lenning of Parison

ATTEND

dusan/Yurtson/densi

Pencarian Lanjut

Cara Penggunaan Aplikasi ILDIS 3

Login Aplikasi ILDIS 3.

Caranya:

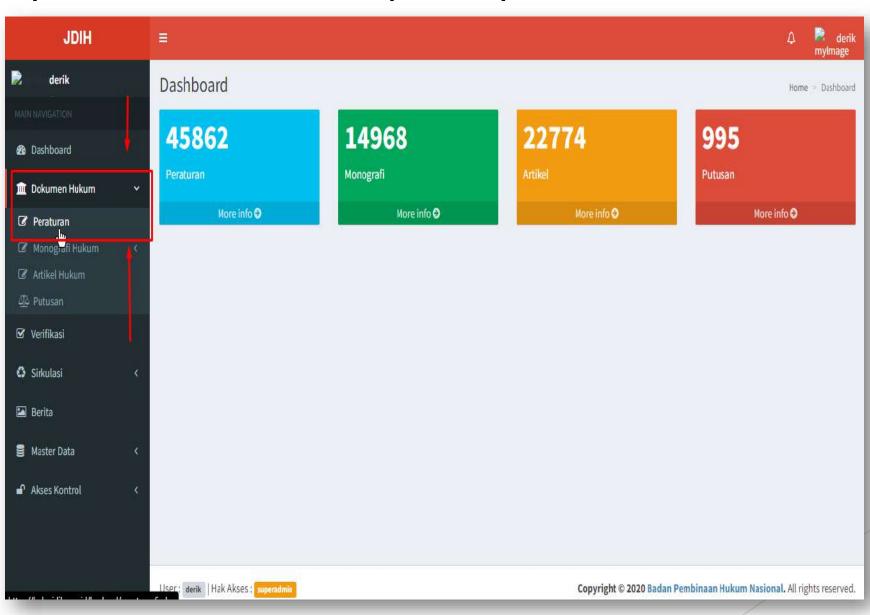
- 1. buka website jdih lalu tambahkan
- " /backend" di belakang urlnya.

Ex: https://jdih.luwukab.go.id/backend

2. Masukan username dan password admin



Tampilan Halaman Admin pada aplikasi ILDIS 3



Cara Input Dokumen Hukum pada Aplikasi ILDIS

Tipe pengolahan peraturan



Caranya:

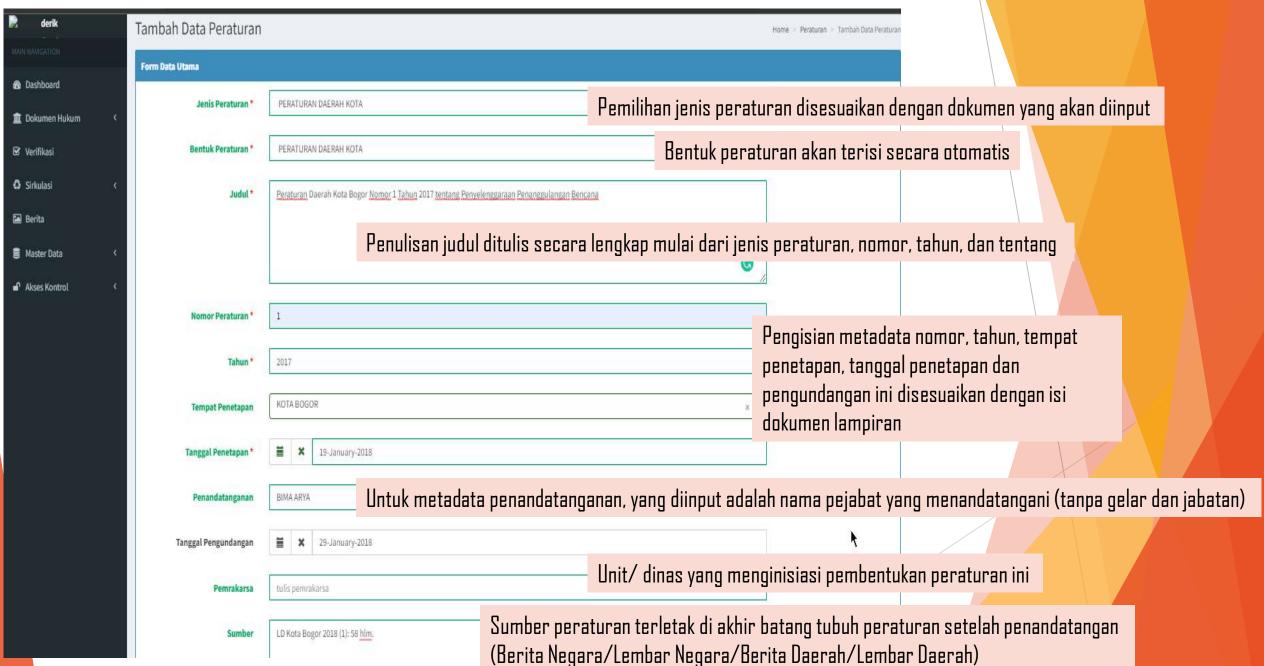
- 1. Klik menu dropdown **Dokumen Hukum**
- 2. Pilih menu **Peraturan**



Metadata Dalam Peraturan Perundang-undangan pada Aplikasi ILDIS 3

- 1. Data Utama (Jenis Peraturan, Judul, Nomor, Tahun, Tempat Penetapan, Tanggal Penetapan, Penandatangan, Tanggal Pengundangan, Pemrakarsa, Sumber, Bahasa, Urusan Pemerintahan, Bidang Hukum, File Dokumen, File Abstrak)
- 2. TEU Badan
- 3. Subyek
- 4. Peraturan terkait
- 5. Dokumen terkait
- 6. Uji Materi
- 7. Status
- 8. Log User (informasi aktifitas user pengelola JDIH)

a. Data Utama Peraturan



a. Data Utama Peraturan

•		
Bahasa	Bahasa yang digunakan dalam peraturan	
Urusan Pemerintahan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan tersebut	
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara	
	Klasifikasi Bidang Hukum, Peraturan ini masuk ke dalam Bidang Hukum apa, contoh: Hukum Perdata, Hukum Pidana,	, ເ
Data Dokumen	Masukan judul lampiran dokumen sesuai dengan standar Permenkumham 8/2019,	
Judul Lampiran	format: 3 digit angka+singkatan jenis peraturan+4 digit kode daerah+3 digit no peraturan (lampiran tidak boleh diupload terpisah dengan batang tubuh)	
Dokumen Lampiran	Unggah dokumen peraturan sesuai judul lampiran □ Browse	
Abstrak	Unggah abstrak peraturan (jika ada)	
Simpan Batal	Setelah selesai, klik simpan	

Catatan: untuk nomor kode daerah bisa melihat lampiran Permenkumham 8/2019 (lampiran 2)

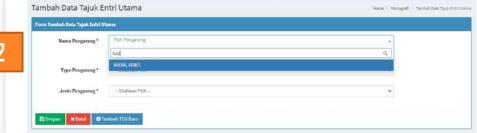
a. Hasil Input Data Utama Peraturan

Data Utama	T.E.U Subjek	Peraturan Terkait Dokumen Terkait Hasil Uji Materi Status Log User
↑ Kembali		July 2 Dokumen
Jenis Peratur	an	PERATURAN DAERAH KOTA
Singkatan Per	raturan	PERATURAN DAERAH KOTA
Nomor Peratu	aran	1
Tahun		2018
Judul Peratur	ran	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Tempat Penet	tapan	KOTA BOGOR
Tanggal Pene	tapan	19 Januari 2018
Tanggal Peng	undangan	29 Januari 2018
Sumber		LD Kota Bogor 2018 (1): 58 hlm.
Bahasa		Indonesia
Bidang Hukur	m	Hukum Administrasi Negara
Dokumen Lan	npiran	2018pd3219001.pdf
Dokumen Abs	strak	Hasil Input Data Utama Peratur
Status Peratu	ran	Berlaku
Keterangan S	tatus	(not set)
Created At		03 Februari 2022 Pukul 20:03:48
Created By		derik
Updated At		03 Februari 2022 Pukul 20:16:44

b. TEU badan/Pengarang

Klik Tambah TEU





 Jika nama pengarang belum pernah diinput pada master data, admin bisa melakukan Tambah T.E.U Baru





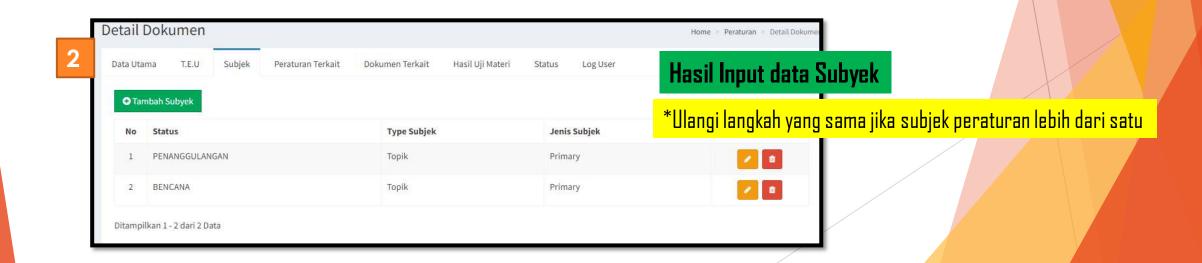
- Untuk peraturan Pusat Seperti UU,PP ditulis: Indonesia
- Untuk peraturan K/L, ditulis: Indonesia.(nama instansi), contoh: Indonesia Badan Keamanan Laut
- Untuk peraturan daerah, ditulis:
- TEU Perda kabupaten/kota, cth: **Bogor (Kabupaten), Bogor (Kota)**
- Untuk peraturan DPRD, ditulis: Nama Kabupaten. DPRD Kabupaten/Kota, cth: Bogor.DPRD Kabupaten, Bogor.DPRD Kota



Klik Tambah Subyek

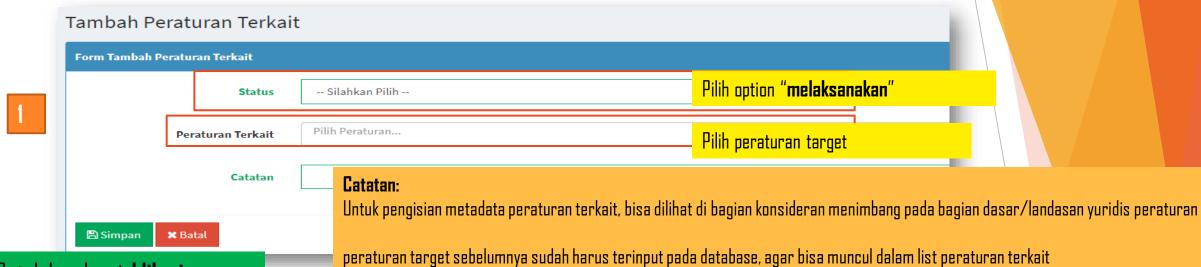
c. Subyek

Form Ubah Data Subyek Subyek *	BENCANA	Metadata subyek berisi kata kunci peraturan, Contoh subyek: BENCANA
Tipe Subyek *	Topik	Pilih dropdown Topik
Jenis Subyek *	Primary	Jenis subyek, pilih option primary
B Simpan ≭ Batal	Setelah selesai kemudian klik simpan	



d. Peraturan Terkait

Klik Tambah peraturan terkait



nya.

Setelah selesai, klik simpan

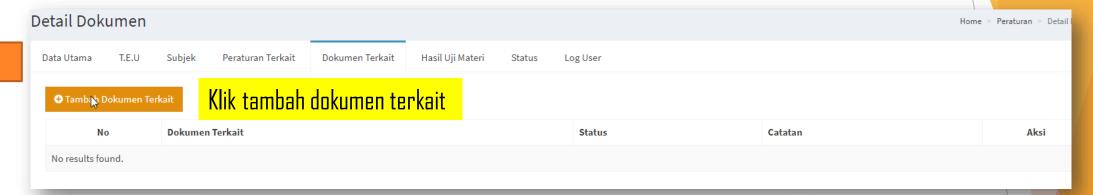
Untuk peraturan terkait cukup diisi dasar peraturan daerah instansi masing-masing yang dijadikan landasan yuridis dalam pembentukan per uu



2

e. Dokumen Terkait

Klik Tambah dokumen terkait



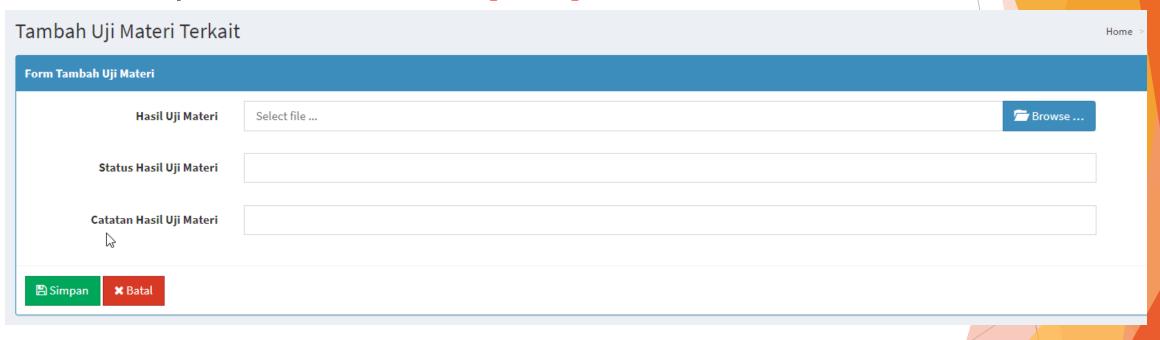
Ketikkan judul dari dokumen terkait, kemudian klik judul dokumen terkait tersebut Tambah Dokumen Terkait Home Peraturan Tambah Dokumen Terkail orm Tambah Dokumen Terkait Pilih Peraturan. Urutan Status Dokumen Pengkajian tentang hukum angkasa dan penegakan kedaulatan di udara Pengkajian tentang pengaruh konvensi/perjanjian internasional terhadap pengembangan hukum Catatan Dokumen Terkait Pengkajian tentang perlindugan hukum terhadap penduduk yang tergolong miskin Pengkajian tentang masalah pemberitaan kejahatan dan asas praduga tak bermasalah Laporan pengkajian tentang pengaruh konvensi/perjanjian internasional terhadap pengembangan Lalu pilih dan klik simpan

2

Catatan: dokumen terkait sebelumnya sudah harus terinput pada database, agar bisa muncul dalam list dokumen terkait

e. Hasil Uji Materi

Tambah Hasil Uji Materi (*khusus untuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah)

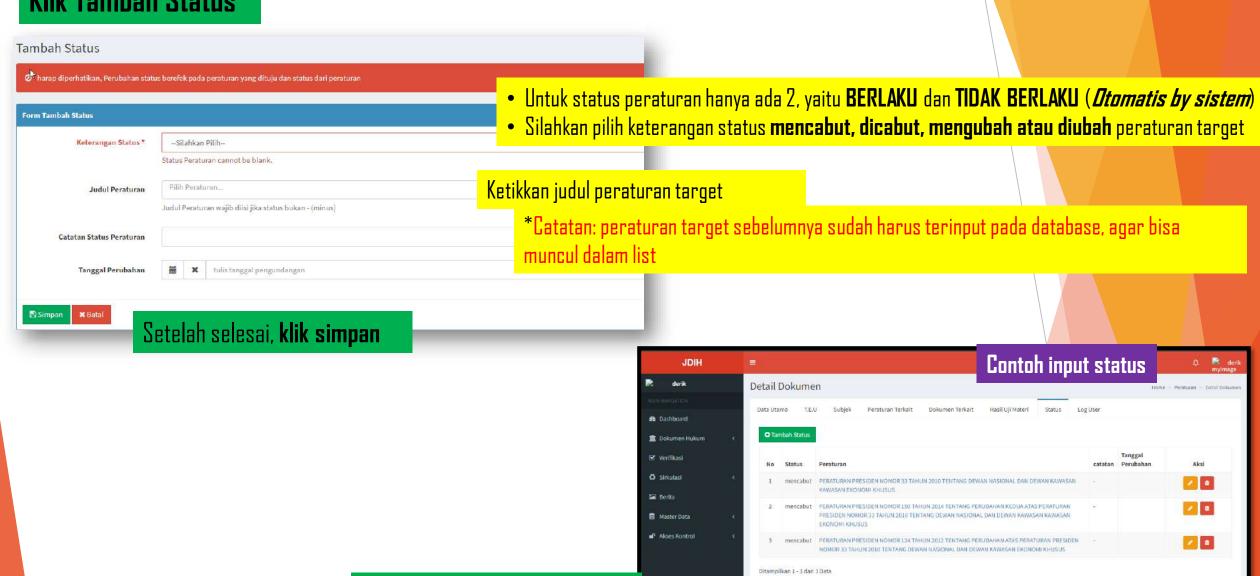


Klik Tambah Status

f. Status Peraturan

User: derik | Hak Akses: programmin

Copyright @ 2020 Badan Pembinaan Hukum Nasional, All rights reserved



HASIL INPUT STATUS PERATURAN

Cara Pengisian Metadata Peraturan Daerah

Metadata	Keterangan	Contoh pengisian
Tipe Dokumen		Peraturan Perundang-Undangan
Jenis/Bentuk Peraturan	Bentuk peraturan	Peraturan Daerah Kabupaten
Singkatan Jenis	Singkatan Peraturan	PERDA
Judul	Judul ditulis lengkap	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
TEU Badan/Pengarang	Daerah.instansi	Tuban (Kabupaten)
Nomor	Nomor peraturan	18
Tahun	Tahun Peraturan	2019
Tempat Penetapan	Tempat Peraturan ditetapkan	Tuban
Tanggal penetapan	Tanggal peraturan ditetapkan	30 Agustus 2019
Tanggal Pengundangan	Tanggal diundangkan	30 Agustus 2019
Sumber	singkatan Lembar Daerah/Berita Daerah+ Tahun + (Nomor LD/BD) : jml halaman	LD Kabupaten Tuban 2019 (268-14): 11 hlm.
Subjek	Topik/ kata kunci dari isi dokumen peraturan	PERANGKAT - DAERAH
Bidang Hukum	Bidang hukum peraturan	Hukum Administrasi Negara
Bahasa	Bahasa	Indonesia

Cara Pengisian Metadata Peraturan Daerah

Metadata	Keterangan	Contoh pengisian
Status	 Status Peraturan hanya Berlaku dan Tidak Berlaku Keterangan Status ialah: mencabut, dicabut, mengubah dan diubah (dibuat nge-link ke peraturan target) 	Status Peraturan: Berlaku Keterangan status: <u>mengubah Perda Kabupaten Tuban Nomor 14</u> <u>Tahun 2016</u>
Lampiran	Peraturan Pusat (UU, PP, Perpres): 2014perpres178.pdf Tahun peraturan+singkatan jenis peraturan+3 digit nomor peraturan Peraturan Daerah: 2019pd5328008.pdf Tahun peraturan+singkatan jenis peraturan+4 digit kode wilayah/daerah+3 digit nomor peraturan Harus berformat pdf text. -BATANG TUBUH, PENJELASAN DAN LAMPIRAN HARUS JADI SATU KESATUAN (JANGAN DIPISAH-PISAH)	2019pd5328008.pdf

Metadata Tambahan dalam aplikasi ILDIS 3

Metadata Peraturan Perundangundangan

Metadata	Keterangan	Contoh pengisian
Urusan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan yang diatur dalam peraturan tersebut	Yustisi
Pemrakarsa	Lembaga yang mengajukan peraturan tersebut	Bagian Hukum Kabupaten Tuban
Penandatangan	Nama Pejabat yang Menandatangani Tanpa gelar dan jabatan	H. FATHUL HUDA
Peraturan Terkait	Dasar yuridis pembentukan peraturan tersebut	1. <u>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016</u> <u>TENTANG PERANGKAT DAERAH</u> .

Hasil Input Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Tempat Terbit

Tanggal Penetapan

Tuban

30 Agustus 2019

Tanggal Pengundangan

Sumber

2019-08-30

LD Kabupaten Tuban 2019 (268-14): 11 hlm

Urusan Pemerintahan

Bidang Hukum

Yustisi

Hukum Administrasi Negara

Bahasa

Pemrakarsa

Indonesia

Bagian Hukum Kabupaten Tuban

Penandatanganan

Peraturan Terkait

Melaksanakan: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT

DAERAH

Dokumen Terkait

Data belum Tersedia

Hasil Uji Materi

Data belum Tersedia

T.E.U BADAN

JENIS DOKUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

STATUS

Berlaku

Lampiran

2019pd5328008.pdf

2019abspd5328008.pdf

Keterangan Status

mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat

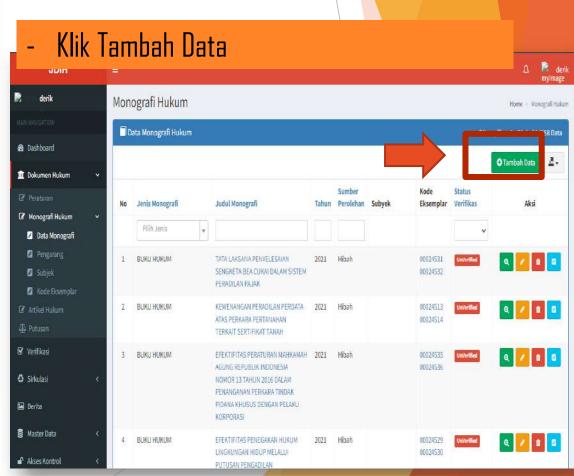
Daerah

SUBJEK: PERANGKAT-DAERAH -

Cara Input Dokumen Hukum pada Aplikasi ILDIS

Tipe pengolahan monografi hukum (buku hukum)

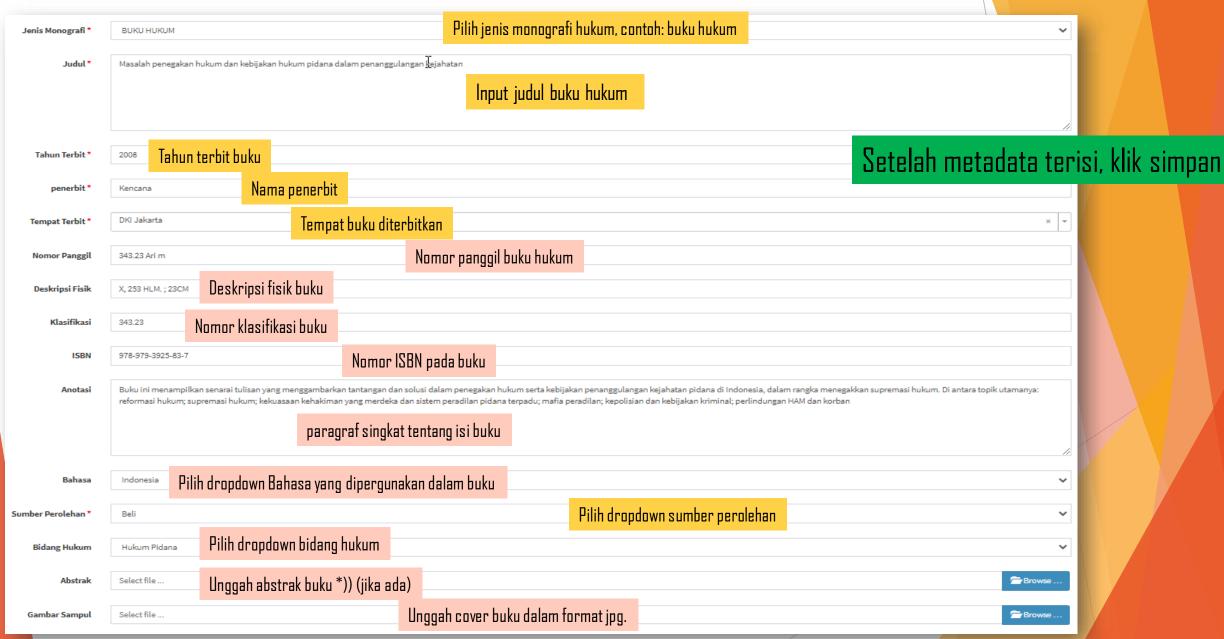




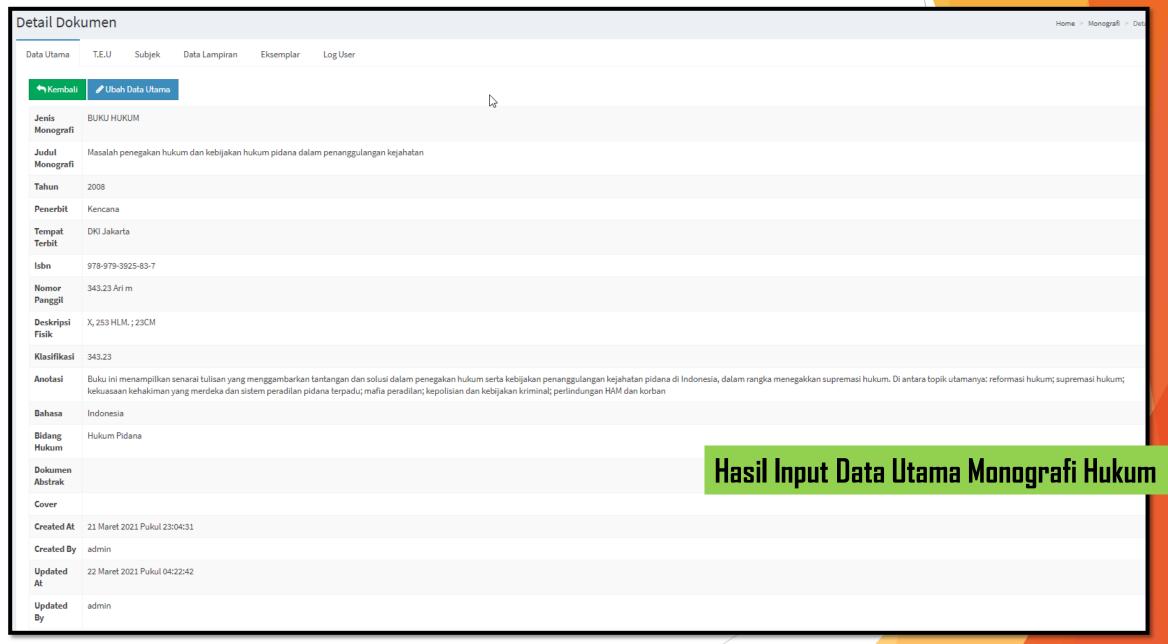
Metadata Dalam Tipe Monografi Hukum pada Aplikasi ILDIS 3

- 1. Data Utama (Jenis Monografi*, Judul*, Tahun Terbit*, Penerbit*, Tempat Terbit*, Nomor Panggil, Deskripsi Fisik, Klasifikasi, ISBN, Anotasi, Bahasa, Sumber Perolehan, Bidang Hukum, Unggah Abstrak, Unggah Gambar Sampul Buku Hukum)
- 2. TEU Badan
- 3. Subyek
- 4. Data Lampiran (dikecualikan untuk Buku Hukum terkait hak cipta)
- 5. Eksemplar
- 6. Log User (informasi aktifitas user pengelola JDIH)

a. Data Utama Monografi Hukum

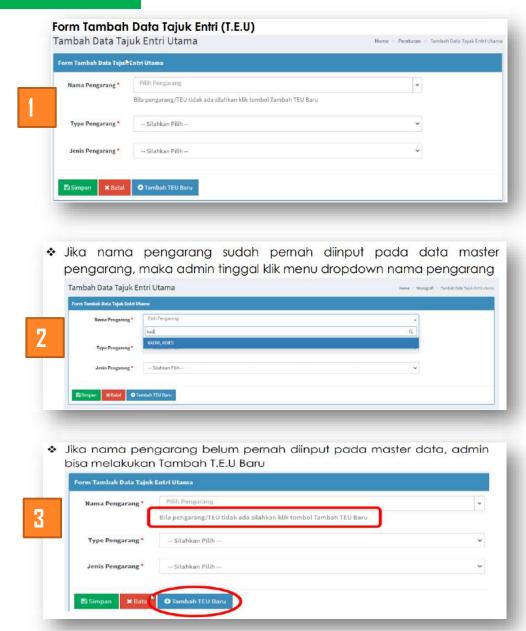


a. Hasil Input Data Utama Monografi Hukum



b. TEU Badan/Pengarang Monografi Hukum

Klik Tambah TEU

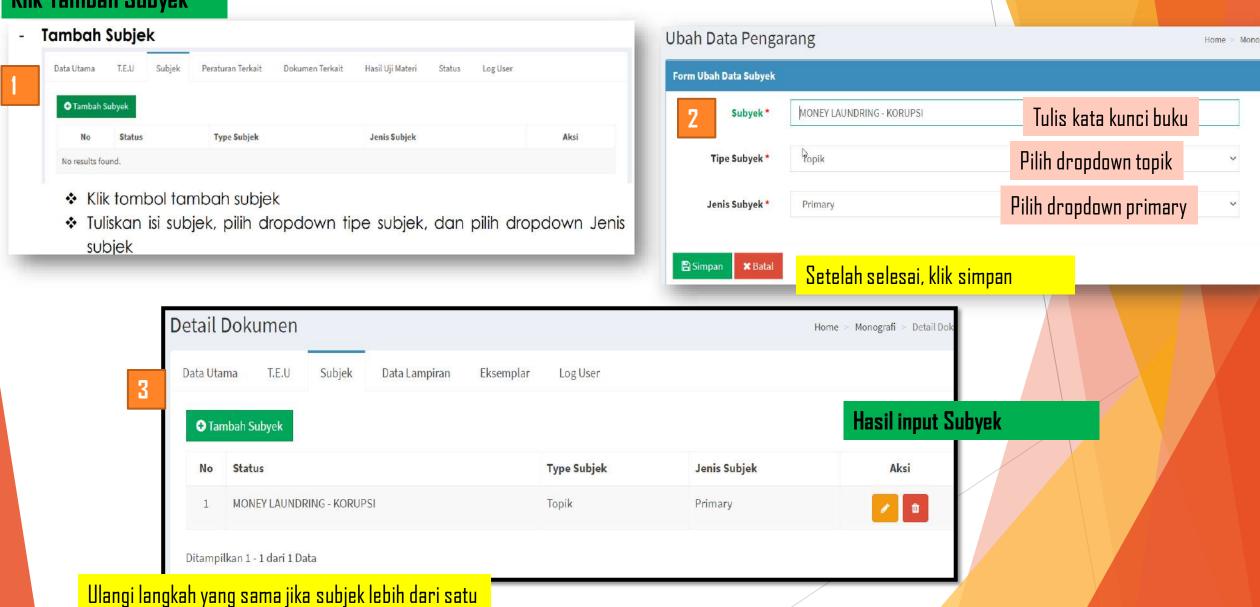




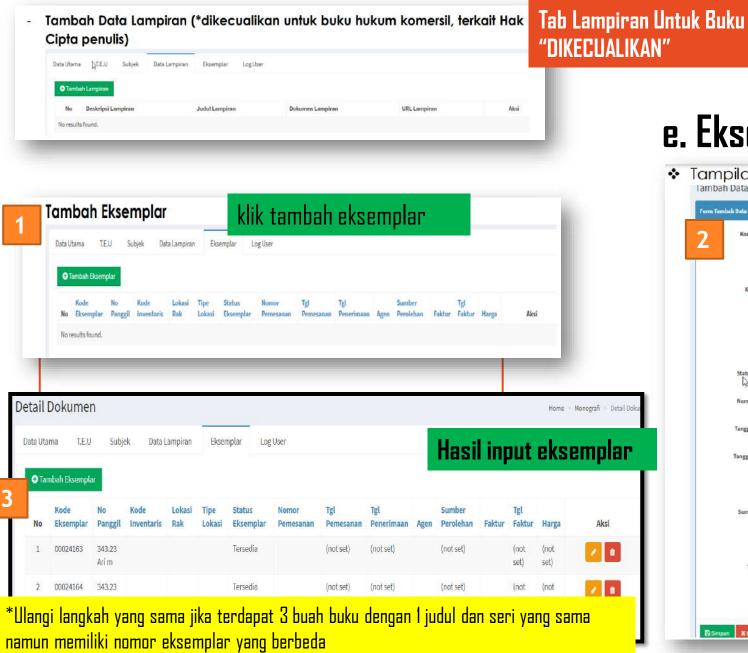


c. Subyek Monografi Hukum

Klik Tambah Subyek



d. Lampiran file



e. Eksemplar

rm Tambuli Data Eksemplar			
Kode Eksemplar 1			Tuliskan kode eksemplar, kode inventaris, loki
No Panggil	347.96	2 KAO m	rak, dan tipe lokasi
Kode Inventaris			
Lokasi Rak			
Tipe Lokasi			
Status Eksemplar *	~Silah	ikan Pilih	Polit I I
Nomor Pemesanan			Pilih dropdown status
Tanggal Pemesanan	Ħ	x 60	eksemplar, tersedia
Tanggal Penerimaan	Ħ	×	s tanggal ponetapan
Agen			
Sumber Perolehan	Beli		
Faktur			
Tanggal Faktur	Ħ	×	Tuliskan Nomor pemesanan, tanggal pemesanan,
Harga			anggal penerimaan, agen, faktur, tanggal faktur da
			narga (terkait administrasi pengadaan buku), setel

Cara Pengisian Metadata Monografi Hukum

Masalah
Penegakan
Hukum dan
Kebijakan
Hukum Pidana
dalam
Penanggulangan
Kejahatan
二人 100 元
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

	Metadata	Keterangan	Contoh Pengisian
	Jenis Monografi		Buku Hukum
	Judul	Huruf Besar hanya diawal judul, selebihnya kecil semua	Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan
	Tahun terbit	Tahun terbit Buku	2008
	Nomor Induk Buku	Nomor buku dalam buku induk	2487
	Nomor Panggil/Klasifikasi	(nomor klasifikasi) + (3 huruf awal nama pengarang) + (huruf awal judul)	343.23 ARI m
١	Cetakan/Edisi	Tergantung Dokumen	Contoh; cetakan ke-II
	Tempat terbit	Tempat terbit buku	Jakarta
	Penerbit	Nama Penerbit	KENCANA
	Deskripsi fisik	Jumlah halaman romawi pada buku, jml halaman buku,; tinggi buku	X, 253 HLM. ; 23CM
	ISBN/ISSN	Nomar ISBN buku	978-979-3925-83-7
Eksemplar	Eksemplar	Buku dengan judul yang sama namun memiliki nomor berbeda	
Į	Bahasa	Bahasa yang digunakan	Indonesia
	Bidang Hukum	Bidang Hukum	Hukum Pidana
	Gambar Sampul	Cover buku	
	TEU Orang/Badan	Nama Pengarang (tanpa gelar dan dibalik)	Arief, Barda Nawawi
	Anotasi	Deskripsi buku hukum	Deskripsi singkat
J	Subjek	Topik/ kata kunci dari isi dokumen	MONEY LAUNDRING - KORUPSI
	File Dokumen	Dikecualikan buku komersil karena berkaitan dengan hak cipta, mak	a dari itu yang diupload hanya gambar cover buku

Hasil Input Monografi (Buku Hukum)

Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan

Nomor Panggil Penerbit 343.23 Ari m Kencana

Tahun Terbit Deskripsi Fisik
2008 X, 253 HLM.; 23CM

Klasifikasi Bahasa 343.23 Indonesia

ISBN Tempat Terbit 978-979-3925-83-7 DKI Jakarta

Anotasi

Buku ini menampilkan senarai tulisan yang menggambarkan tantangan dan solusi dalam penegakan hukum serta kebijakan penanggulangan kejahatan pidana di Indonesia, dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Di antara topik utamanya: reformasi hukum; supremasi hukum; kekuasaan kehakiman yang merdeka dan sistem peradilan pidana terpadu; mafia peradilan; kepolisian dan

kebijakan kriminal; perlindungan HAM dan Bidang Hukum korban Hukum Pidana

EKSEMPLAR

lokasi Rak	Status Buku
	Tersedia
	Tersedia
	lokasi Rak

T.E.U BADAN

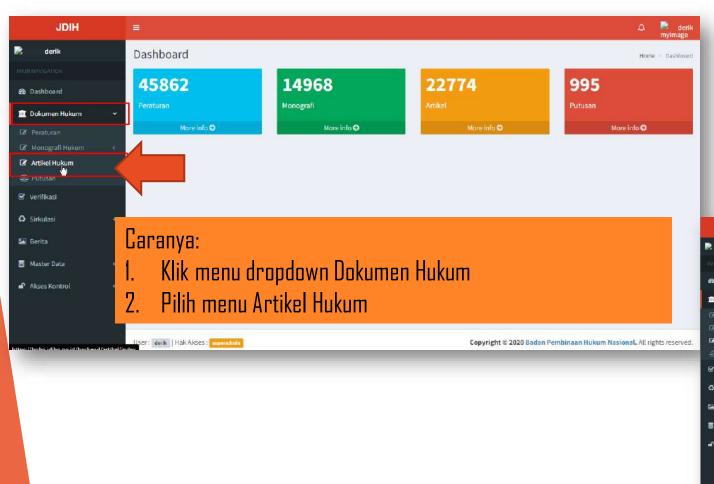
Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang	
Arief, Barda Nawawi	Nama Orang	Pengarang Utama	

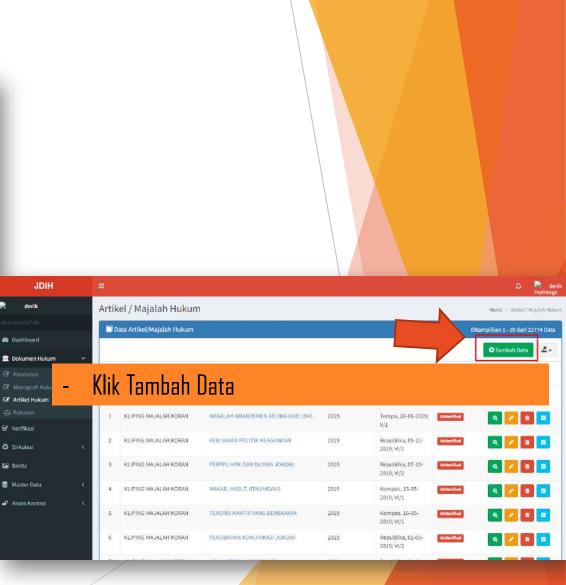
SUBJEK: MONEY LAUNDRING - KORUPSI -



Cara Input Dokumen Hukum pada Aplikasi ILDIS

Tipe pengolahan artikel hukum





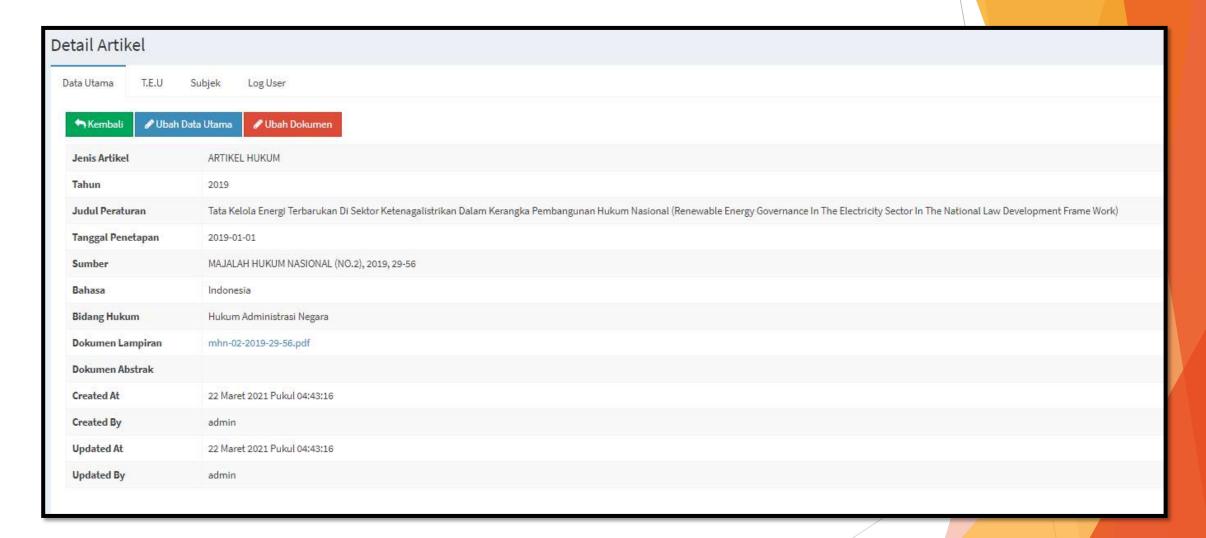
Metadata Dalam Tipe Artikel Hukum pada Aplikasi ILDIS 3

- 1. Data Utama (Jenis Artikel, Judul, Tahun, Tanggal Artikel, Sumber, Bahasa, Bidang Hukum, Dokumen Lampiran)
- 2. TEU Badan
- 3. Subyek
- 4. Log User (informasi aktifitas user pengelola JDIH)

a. Data Utama Artikel Hukum

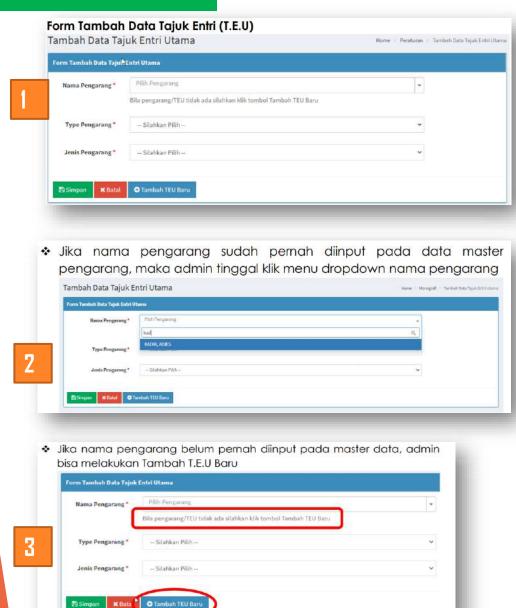
Tambah Data Artikel		
Form Data Utama Artikel		
Jenis Artikel *	ARTIKEL HUKUM Pilih jenis artikel hukum	
Judul *	Tata <u>Kelola Energi Terbarukan</u> Di <u>Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka</u> Pembangunan <u>Hukum</u> Nasional (Renewable Energy Governance In The Electricity Sector In The National Law Development Frame Work) Tulis judul artikel	
Tahun *	Tahun diterbitkannya artikel	
Tanggal Artikel *	Tanggal diterbitkannya artikel	
Sumber *	MAJALAH HUKUM NASIONAL (NO.2), 2019, 29-56	
	input nama majalah yang mempublikasi artikel tsb	
Bahasa *	Indonesia Pilih dropdown Bahasa artikel •	
Bidang Hukum	Pilih dropdown Bidang Hukum yang dibahas dalam artikel tersebut	
Lampiran		
Judul Lampiran	MHN-02-2019-29-56.pdf Input nama file lampiran artikel	
Dokumen Lampiran	Input file lampiran dalam bentul pdf Remove Serowse Remove Serowse	
Abstrak	Select file	

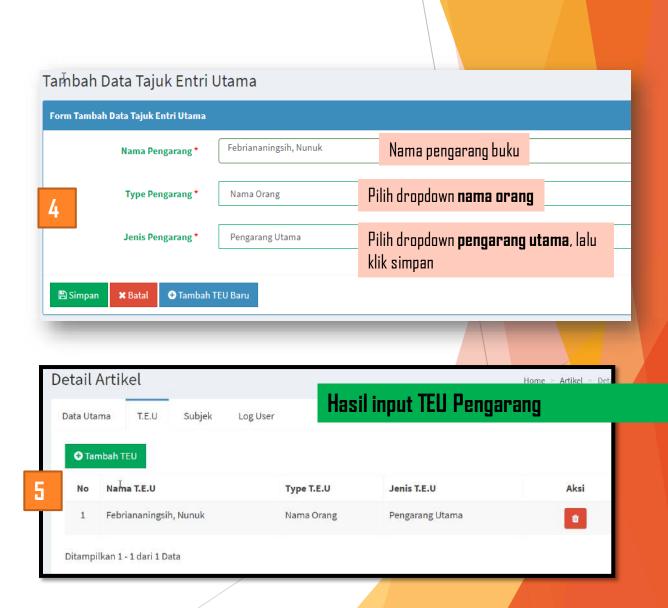
a. Hasil Input Data Utama Artikel Hukum



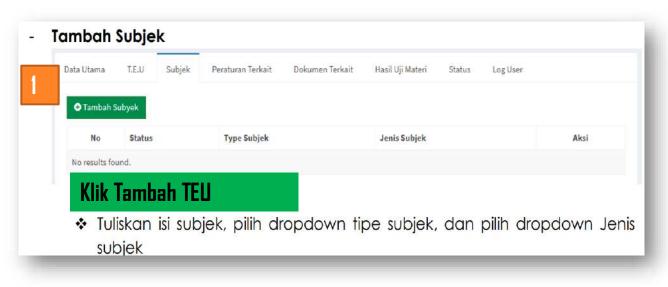
b. TEU Badan/Pengarang Artikel

Klik Tambah TEU





c. Subyek







Cara Pengisian Metadata Artikel Hukum



TATA KELOLA ENERGI TERBARUKAN DI SEKTOR KETENAGLISTRIKAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

(RENEWABLE ENERGY GOVERNANCE IN THE ELECTRICITY SECTOR IN THE NATIONAL LAW DEVELOPMENT FRAME WORK)

Oleh: Nunuk Febriananingsih

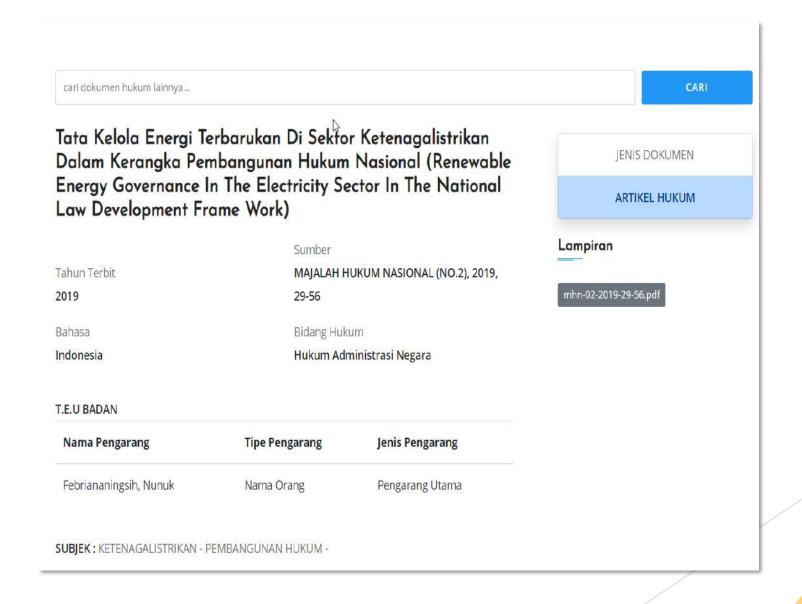
Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI Email: febrianasdalh1@gmail.com

ABSTRAK

Listrik merupakan sumber daya energi yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak. Pemerintah sudah berusaha untuk membebaskan Indonesia dari krisis energi listrik dan berupaya mencari alternatif penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah telah berkomitmen bahwa EBT akan terus dikembangkan untuk menjamin ketahanan energi di Indonesia serta memenuhi permintaan listrik yang kian bertambah. Pemerintah menetapkan target 23% porsi energi bersih dalam bauran energi nasional di tahun 2025 dan 31% pada tahun 2030 melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (selanjutnya disebut Permen ESDM 50/2017) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga

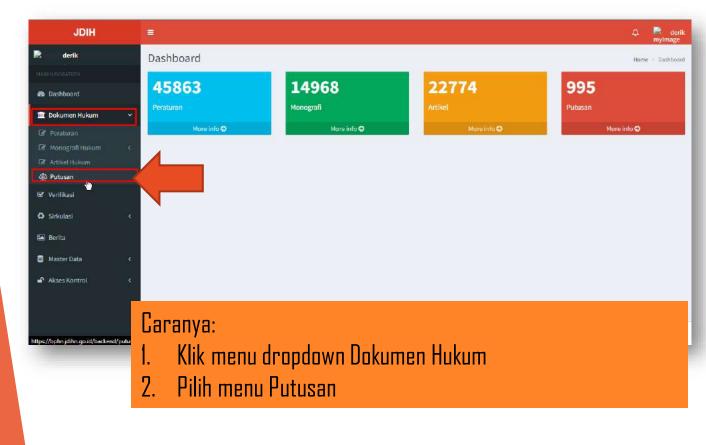
Metadata	Cara Pengisian	
Tipe Dokumen	Artikel Hukum	
Judul	Yang benar: tuliskan judul artikel yang terdapat dalam MHN Contoh: Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional (Renewable Energy Governance In The Electricity Sector In The National Law Development Frame Work)	
Tempat Terbit/penetapan	Jakarta	
Tahun	2019	
Bahasa	Indonesia	
Sumber	Contoh pengisian yang benar: MAJALAH HUKUM NASIONAL (NO.2), 2019, 29-56	
Bidang Hukum	Bidang hukum yang dibahas dalam artikel/jurnal Contoh : Hukum Administrasi Negara	
Lokasi	Tempat dokumen fisik dikelola (nama instansi disingkat), contoh: BPHN	
TEU Orang / Badan	Nama tokoh pengarang/instansi yang membuat artikel/majalah hukum (tanpa gelar dan dibalik) Contoh: Febriananingsih, Nunuk	
Subjek	Kata kunci Artikel: KETENAGALISTRIKAN-PEMBANGUNAN HUKUM	
File Dokumen	File Pdf, seharusnya: contoh nama file : MHN-02-2019-29-56.pdf	

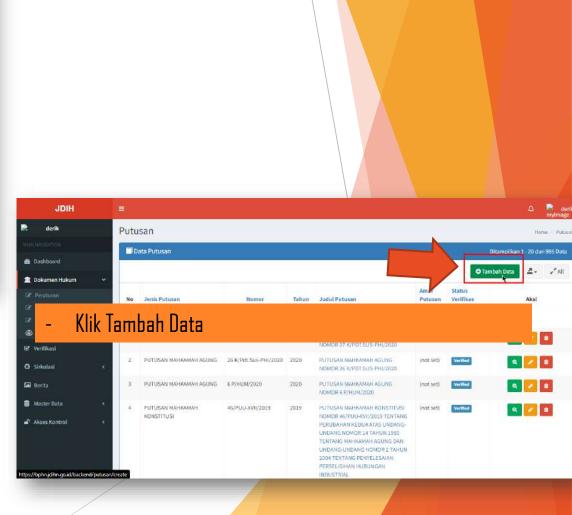
Hasil Input Artikel Hukum



Cara Input Dokumen Hukum pada Aplikasi ILDIS

Tipe pengolahan Putusan

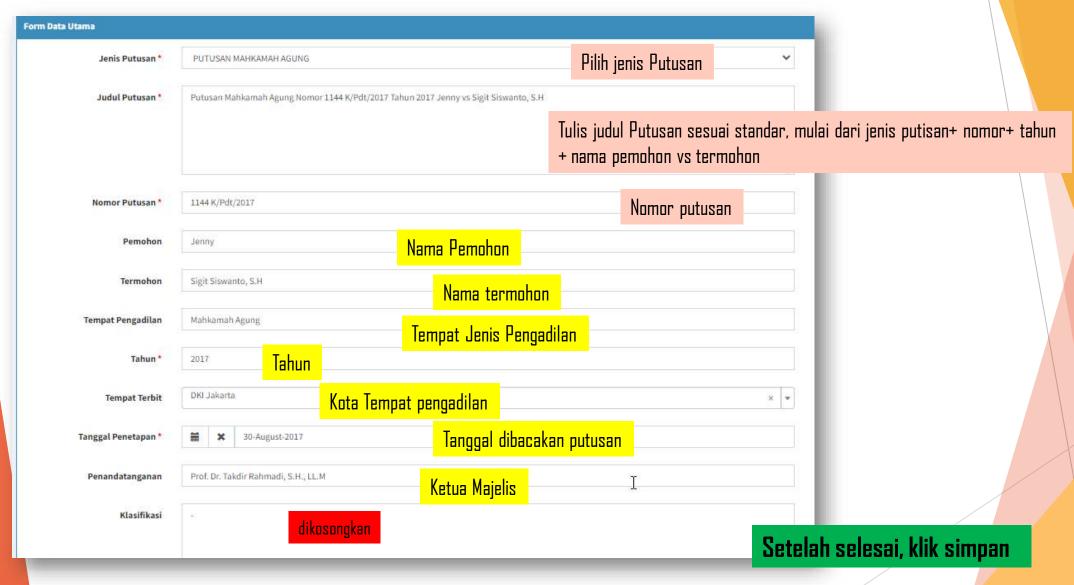




Metadata Dalam Tipe Putusan pada Aplikasi ILDIS 3

- 1. Data Utama (Jenis Putusan, Judul, Nomor Putusan, Pemohon, Termohon, Tempat Pengadilan, Tahun, Tempat Terbit, Tanggal Penetapan, Penandatangan, Bahasa, Tingkat Kasasi, Bidang Hukum, Amar Putusan, Dokumen Lampiran)
- 2. TEU Badan
- 3. Subyek
- 4. Peraturan Terkait
- 5. Dokumen Terkait
- 6. Log User (informasi aktifitas user pengelola JDIH)

a. Data Utama Putusan



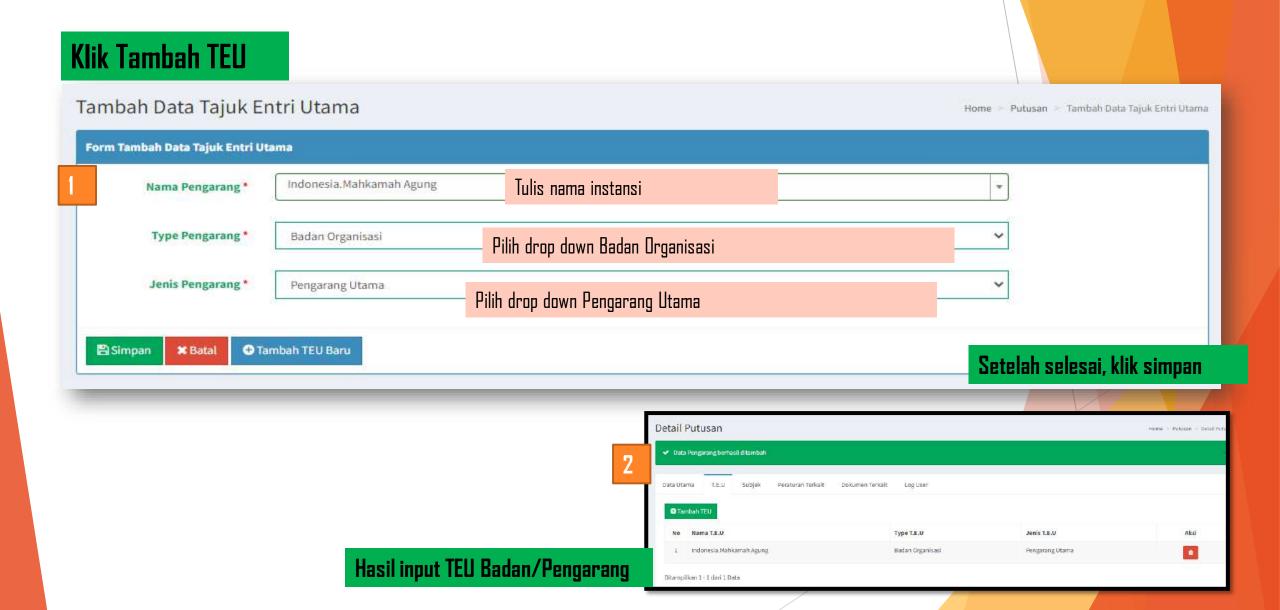
a. Data Utama Putusan



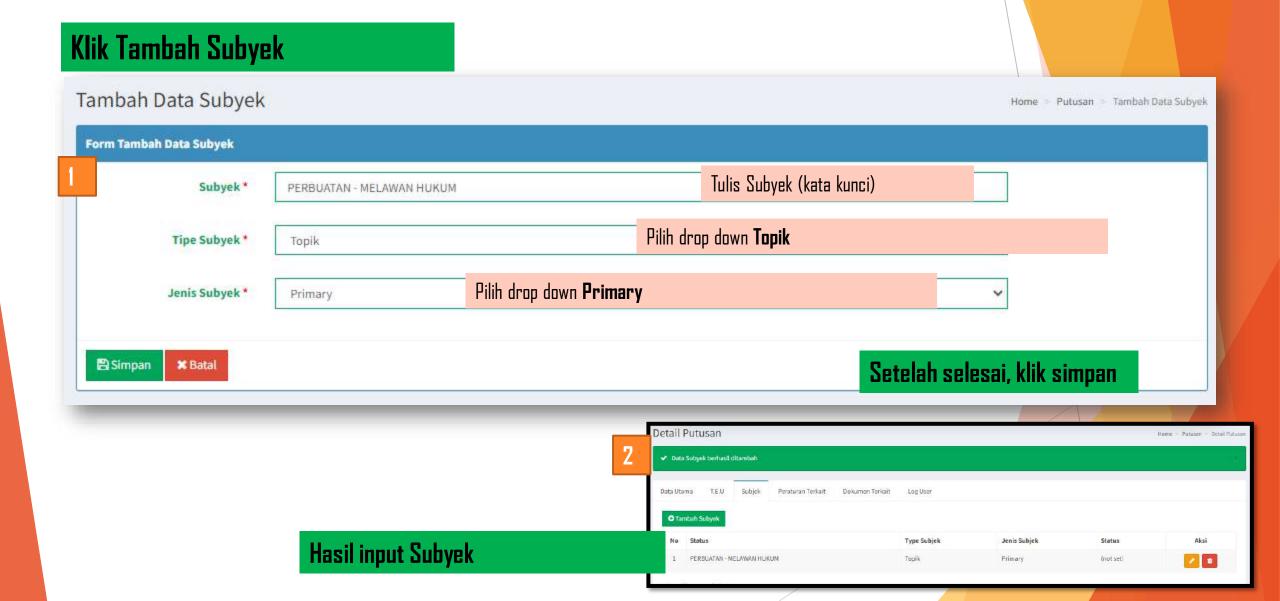
Hasil Input Data Utama Putusan

✓ Data Putusan berhasil dlubah	
Data Utama T.E.U Subjek P	Peraturan Terkait Dokumen Terkait Log User
► Kembali ✓ Ubah Data Utama	✓ Ubah Dokumen
Jenis Putusan	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Judul Putusan	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pdt/2017 Tahun 2017 Jenny vs Sigit Siswanto, S.H
Nomor Putusan	1144 K/Pdt/2017
Pemohon	Jenny
Termohon	Sigit Siswanto, S.H
Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Tahun	2017
Tempat Penetapan	DKI Jakarta
Tanggal Penetapan	2017-08-30
Penandatanganan	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLIM
Klasifikasi	
Bahasa	Indonesia
Tingkat Proses	Kasasi
Bidang Hukum	Hukum Perdata
Dokumen Lampiran	2017ma31021144k_pdt_2017.pdf
Dokumen Abstrak	
Amar Putusan	Menolak
Created At	03 Februari 2022 Pukul 22:32:29
Created By	derik
Updated At	03 Februari 2022 Pukul 22:32:54

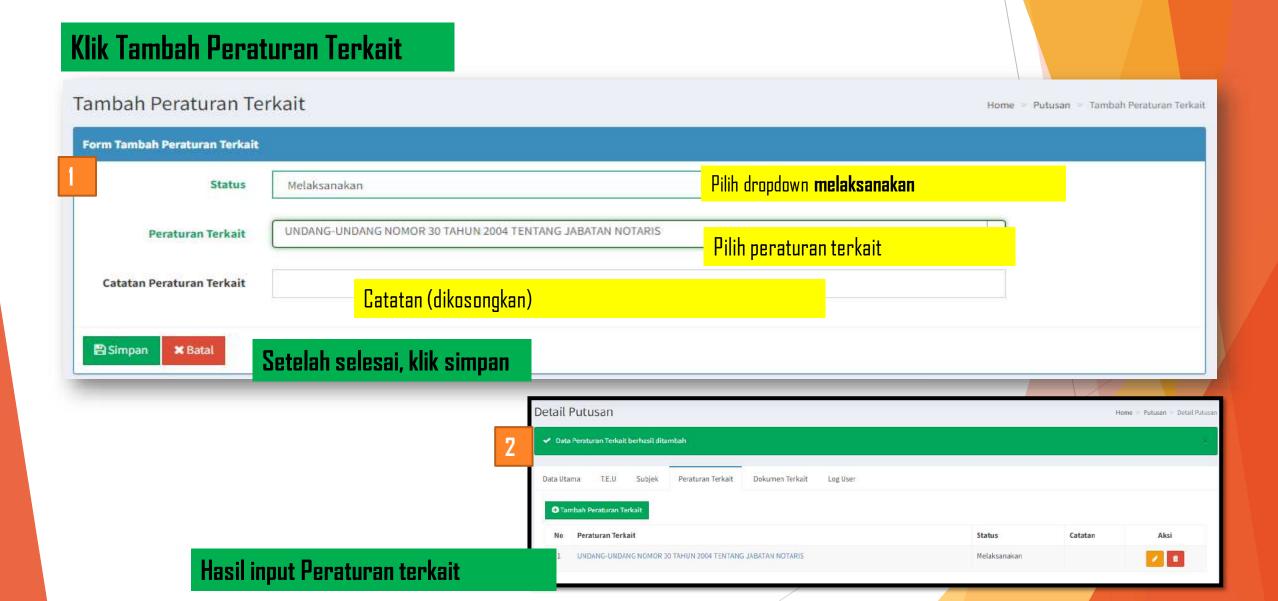
b. Teu Badan/Pengarang



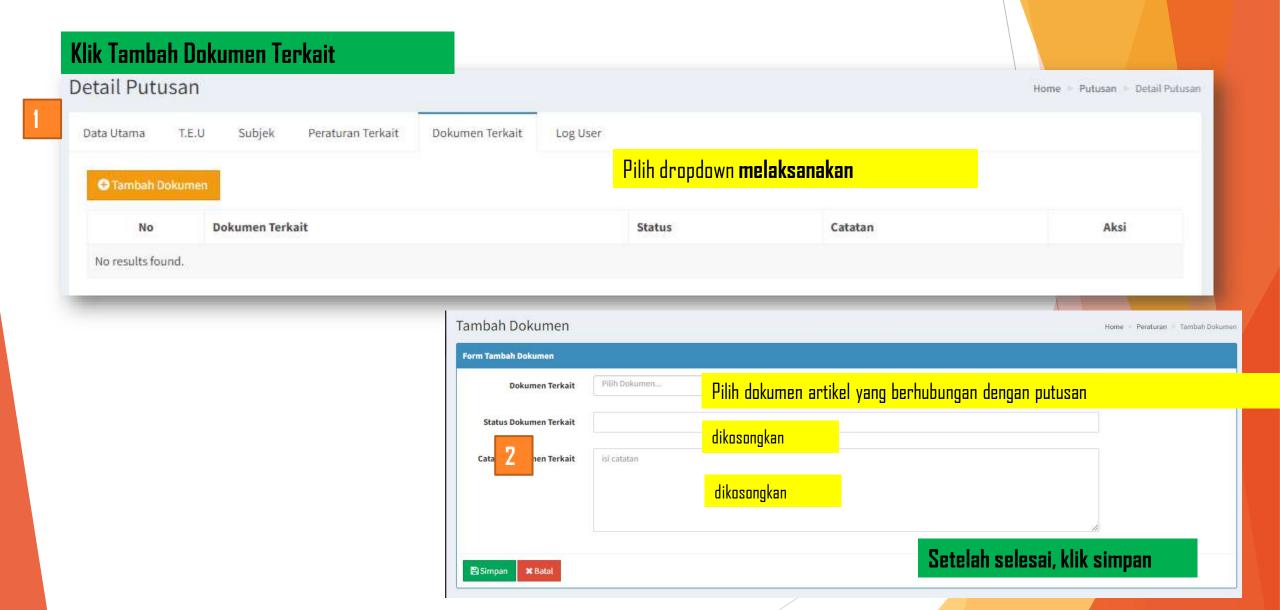
c. Subyek



d. Peraturan Terkait



e. Dokumen Terkait



Contoh Cara Pengisian Metadata Putusan

Metadata	Cara Pengisian
Tipe Dokumen	Putusan Pengadilan
Judul	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pdt/2017 Tahun 2017 Jenny vs Sigit Siswanto, S.H
T.E.U Badan	Indonesia. Mahkamah Agung
Nomor Putusan	1144 K/Pdt/2017
Jenis Peradilan	Mahkamah Agung
Singkatan Jenis Peradilan	MA
Tempat Peradilan	Jakarta
Tanggal dibacakan	30 Agustus 2017
Pemohon	Jenny
Termohon	Sigit Siswanto, S.H
Lokasi	Mahkamah Agung
Subjek	PERSELISIHAN - HUTANG
Status/Amar Putusan	Menolak
Bahasa	Indonesia
Tingkat Proses	Kasasi
Bidang Hukum/Jenis Perkara	Hukum Perdata
Lampiran	4 digit tahun perkara+singkatan peradilan+4 digit kode wilayah+nomor putusan Contoh: 2017ma31021144k_pdt_2017.pdf

Hasil Input Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pdt/2017 Tahun 2017 Jenny vs Sigit Siswanto, S.H

Klasifikasi

Amar Putusan

_

Menolak

Tanggal Dibacakan

Tingkat Proses

2017-08-30

Kasasi

Penggugat/Pemohon

Tergugat/Termohon

Jenny

Sigit Siswanto, S.H

Tempat Pengadilan

Lokasi

Mahkamah Agung

DKI Jakarta

Bahasa

Indonesia

T.E.U BADAN

Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang
Indonesia.Mahkamah Agung	Badan Organisasi	Pengarang Utama

SUBJEK: PERSELISIHAN - HUTANG -

JENIS DOKUMEN

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

AMAR PUTUSAN

Menolak

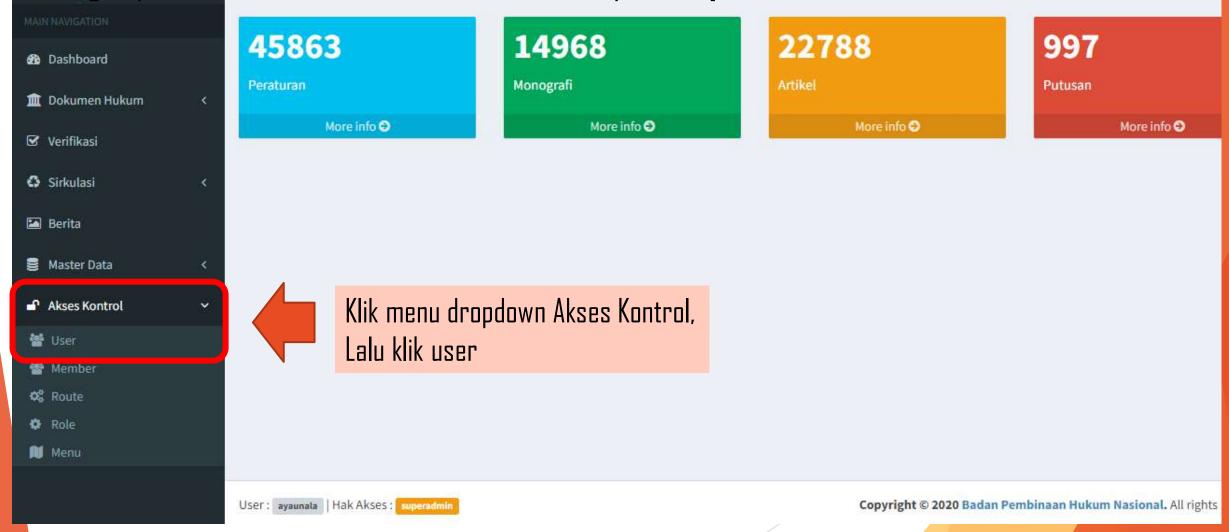
Lampiran

2017ma31021144k_pdt_2017.pdf

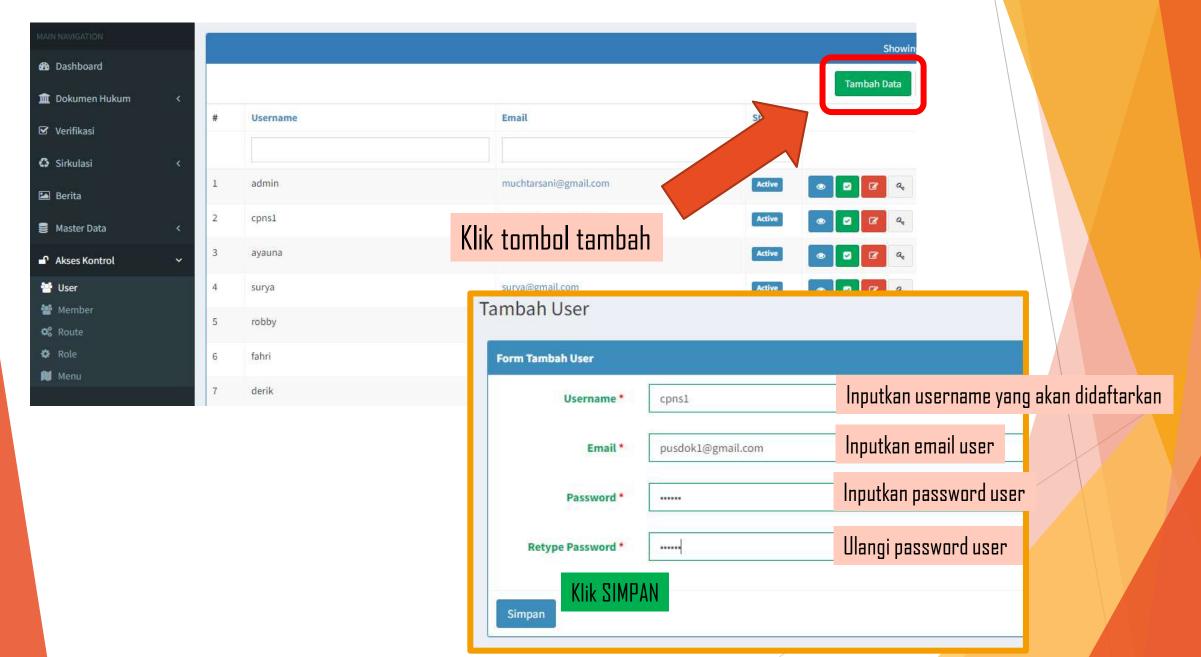
Fitur Penambahan User Admin

Catatan:

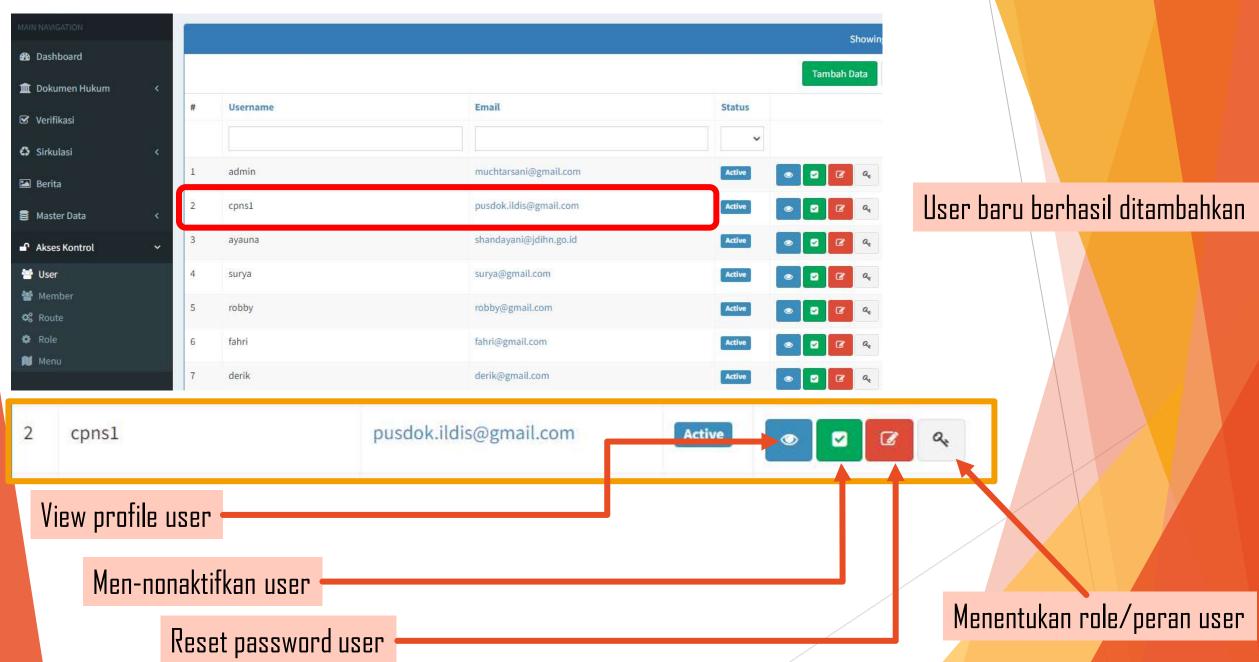
* Yang dapat melakukan Penambahan User Admin yaitu **Superadmin**



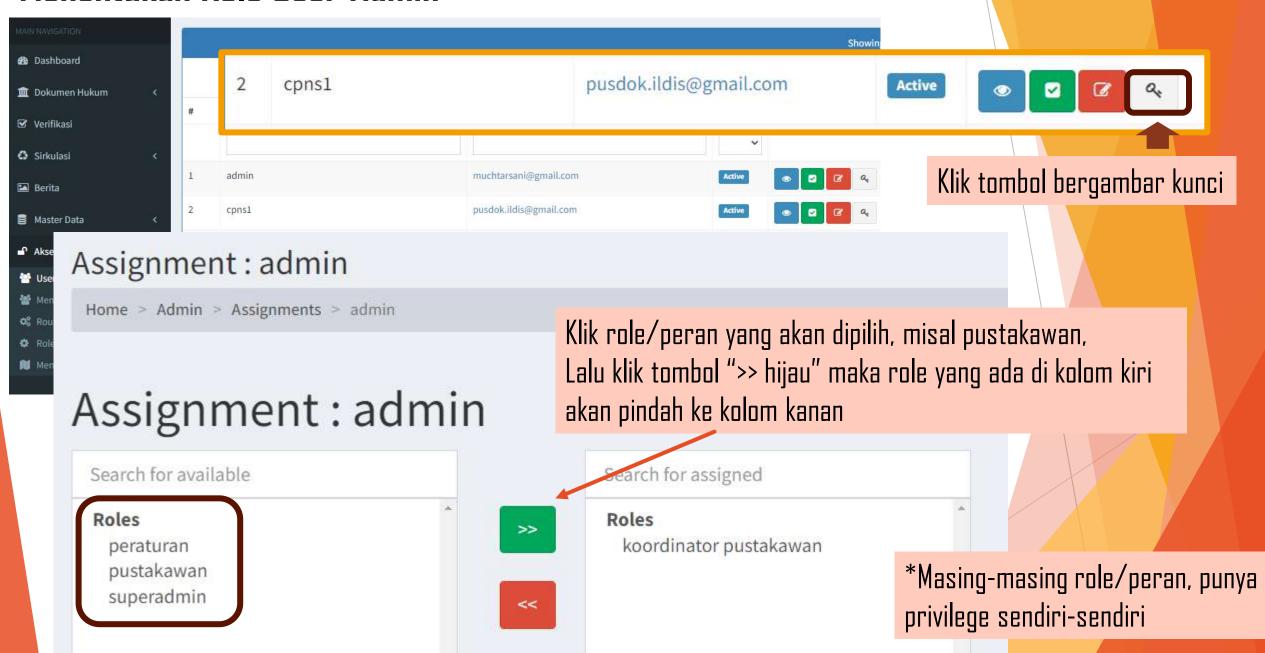
Menambah User Admin



User Admin



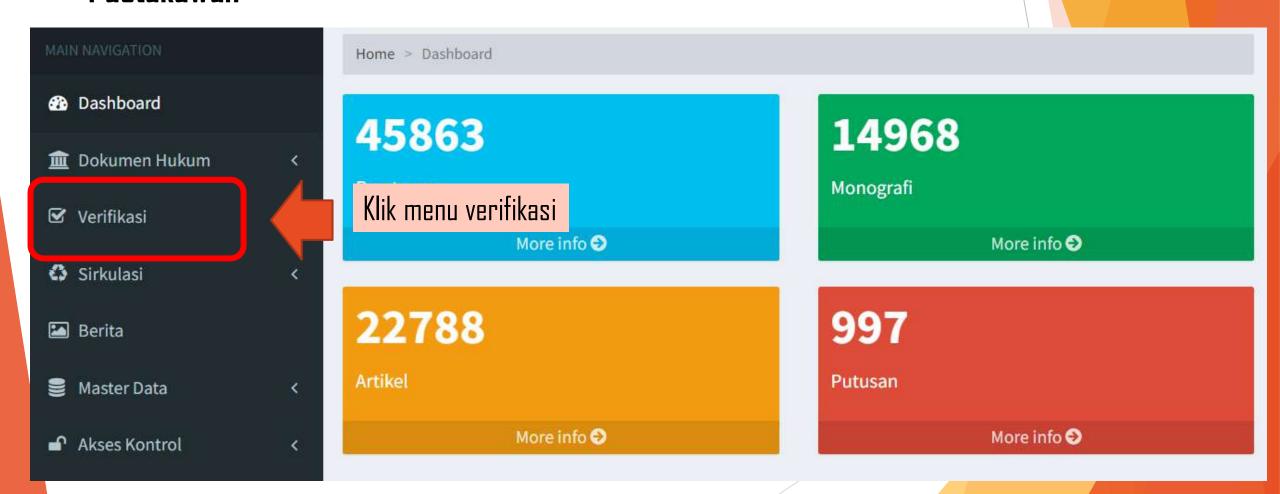
Menentukan Role User Admin



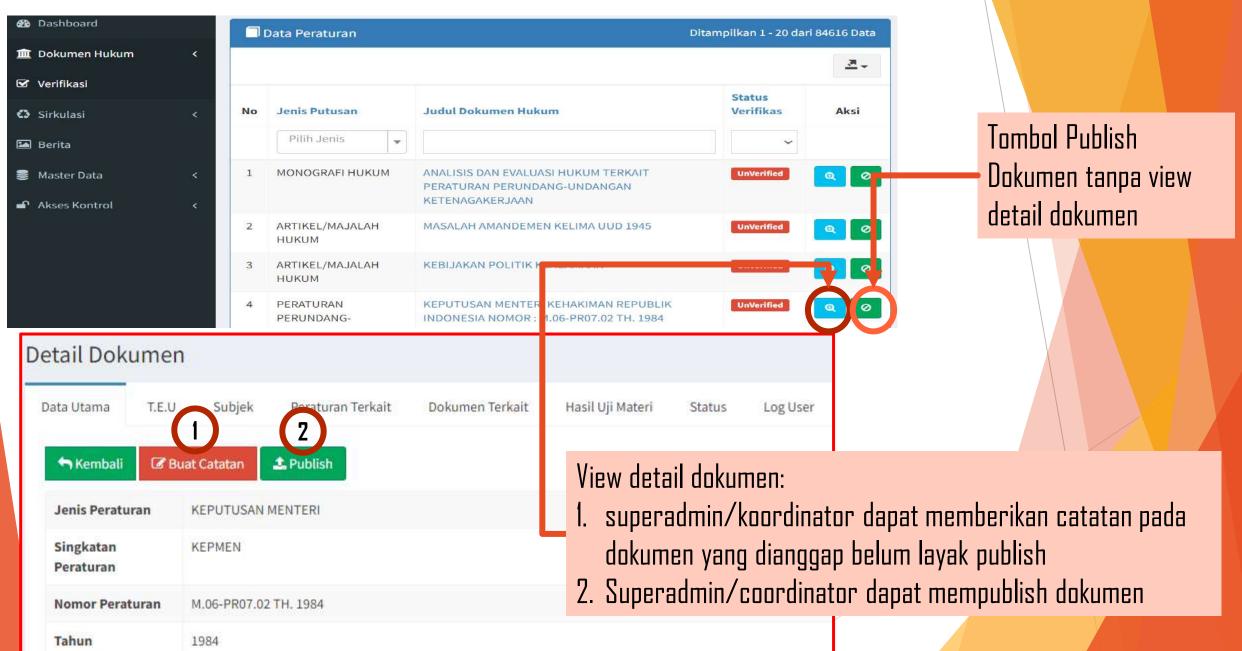
Fitur Verifikasi

Catatan:

- Hanya terdapat pada ILDIS V3.1
- Role yang dapat melakukan verifikasi adalah Superadmin dan Koordinator Pustakawan



Fitur Verifikasi





IARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM





TERIMA KASIH

Pencarian Lanjut